

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Organisasi internasional adalah fenomena yang relatif baru dalam hubungan internasional. Organisasi internasional (OI) pertama kali muncul di panggung hubungan internasional lebih dari seabad yang lalu, dalam sistem negara modern yang telah ada selama lebih dari 200 tahun. Sebelum munculnya OI yang bersifat inklusif, dalam sistem internasional telah ada sebuah hubungan berupa aliansi militer dan organisasi antar pemerintah eksklusif di antara negara-negara berdaulat (Barkin, 2006). Pada akhir abad ke-19, organisasi internasional pertama kali dibuat melalui perjanjian di antara negara-negara dengan tujuan yang hanya khusus untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi sejumlah negara pada saat itu.

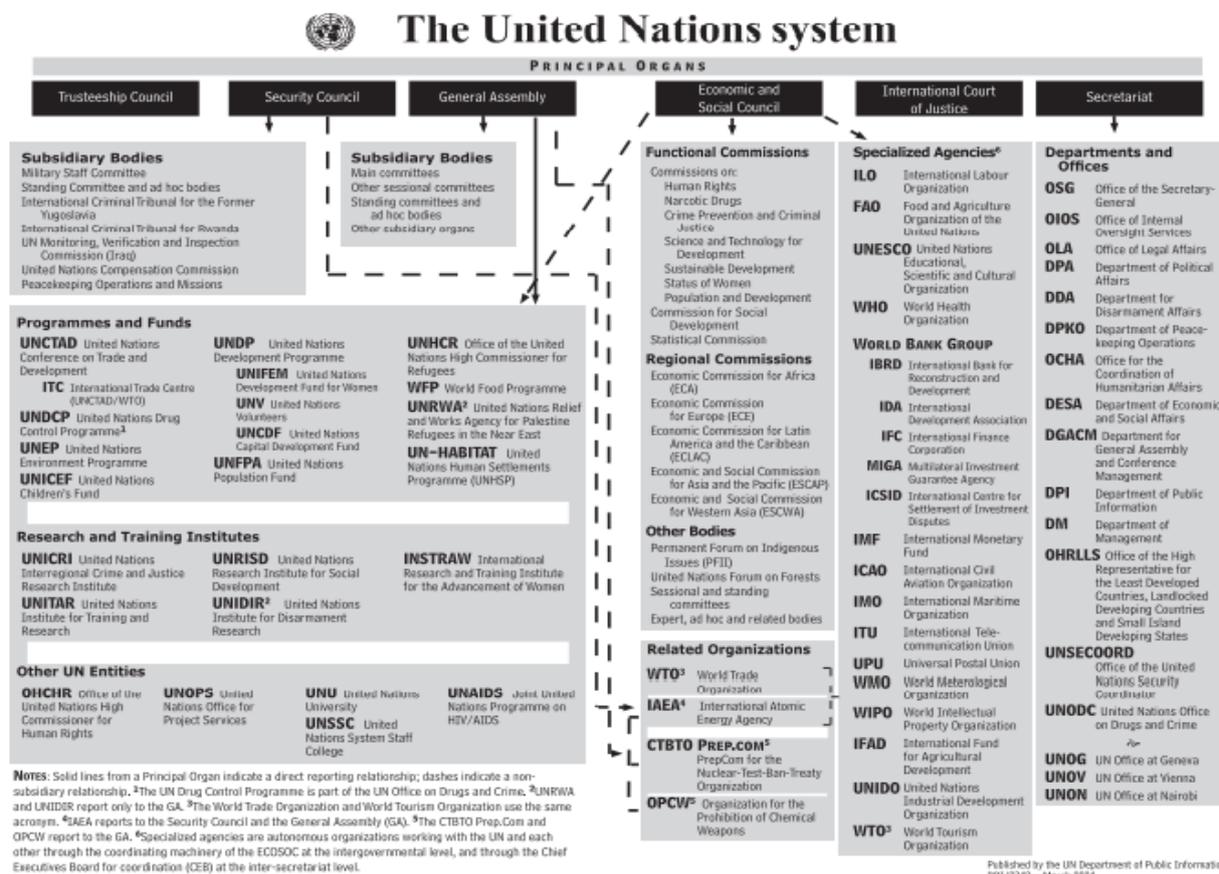
Pada awalnya, organisasi internasional dirancang untuk mengatasi masalah-masalah spesifik terkait perekonomian di tingkat regional. Seiring berjalannya dinamika hubungan internasional, pertumbuhan OI kemudian terus meningkat khususnya pasca Perang Dunia I (1914-1918) yang diawali oleh organisasi baru dengan kewenangan yang lebih luas, yaitu Liga Bangsa-Bangsa (LBB). LBB dibentuk dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional bagi negara-negara anggotanya serta dengan tujuan yang lebih spesifik yaitu menghindari terulangnya kekejaman Perang Dunia I (PD I). Kemudian, mengikuti dinamika dalam hubungan internasional tersebut, dibentuklah organisasi internasional lain dengan ranah yang lebih luas, misalnya seperti *International Labour Organization* (ILO) terkait penanganan masalah ketenagakerjaan secara internasional. Sayangnya, LBB kemudian dinilai gagal dalam menjalankan tujuannya untuk mencegah terjadinya perang pasca PD I, di

mana Perang Dunia II (PD II) (1939 – 1945) pada akhirnya tetap tidak terhindarkan, sehingga organisasi ini gagal bertahan.

Setelah PD II, LBB lalu digantikan oleh organisasi dengan tujuan yang lebih ambisius yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan pernyataan dalam Piagam PBB, sebagai OI, PBB akan menangani masalah-masalah terkait perdamaian dan keamanan internasional, di mana hal ini sebenarnya sama dengan yang seharusnya ditangani oleh LBB namun gagal dilakukan. PBB kemudian memiliki berbagai organisasi dengan ranah penanganan isu yang berbeda-beda di bawah payungnya secara internasional. Terhitung sejak pecahnya PD II, jumlah OI kemudian kian berkembang secara lambat pada awalnya, dan terus berkembang pesat hingga dewasa ini. Di mana, berdasarkan data dari Union of International Associations (UIA), terdapat 68,000 organisasi internasional (baik yang aktif maupun yang tidak aktif) di dunia yang memenuhi kriteria hingga saat ini (Union of International Associations, n.d.).

Secara lebih luas, PBB memiliki suatu sistem yang disebut dengan “*UN System*” yang mencakup sekelompok besar OI. Terkait OI yang berada di bawah payung PBB, terdapat pula di antaranya yang tidak berada dalam hierarki administratif *headquarter* PBB. Oleh karenanya, diperlukan penjelasan tentang bagaimana berbagai lembaga yang menjadi bagian dari sistem PBB saling terkait satu sama lain. Pada dasarnya, PBB mengacu pada negara anggota (saat ini 193) (Union of International Associations, n.d.), dokumen konstitusional (Piagam PBB), dan enam badan utama yaitu *General Assembly (GA)*, Dewan Keamanan, Sekretariat, *International Court of Justice (ICJ)*, *Economic and Social Council (ECOSOC)*, dan *Trusteeship Council*. Organisasi-organisasi ini secara langsung diamanatkan dalam Piagam PBB. Terdapat sejumlah badan otonom yang menjadi bagian dari sistem PBB tetapi secara administratif tidak berada di bawah badan-badan pusat PBB. Terakhir, terdapat organisasi regional yang dirancang untuk menjalankan sebagian fungsi dari organisasi pusat untuk urusan regional. Seperti halnya badan-badan otonom, organisasi-organisasi regional ini secara administratif tidak berada di bawah badan-badan pusat, tetapi didorong dalam sistem PBB sebagai mini-UN regional (gambar 1).

Gambar 1. Struktur badan PBB



(Sumber: *The World's Largest Humanitarian Agency* (Shaw, 2011))

Pada tahun 2019, tercatat bahwa PBB memiliki anggota sebanyak 193 negara, dengan banyaknya negara anggota tersebut, masing-masing memiliki isu nasional yang kemudian mempengaruhi kestabilan di tingkat regional maupun internasional, sehingga PBB melalui organisasi yang berada di bawah payungnya dengan kekhususan masing-masing terhadap suatu isu yang spesifik diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan demi mencapai perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan ambisi dibentuknya organisasi ini. Dalam penelitian ini, terkait topik yang akan diangkat, maka penulis akan menjelaskan lebih lanjut latar belakang objektif sebuah organisasi yang dibentuk oleh PBB dengan tujuan mengatasi kerawanan pangan di dunia yaitu *World Food*

Programme (WFP), selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor dua PBB yaitu Zero Hunger (Shaw, 2011).

Proses dibentuknya WFP sebagai organisasi kemanusiaan internasional tidaklah singkat, melainkan melalui proses yang panjang. Pada sejarahnya, bantuan kemanusiaan awalnya diberikan oleh AS bagi korban bencana alam dan kelaparan di awal abad ke-19. Kemudian, operasi bantuan makanan besar pertama terjadi selama dan setelah PD I yang ditujukan sebagai program bantuan dan rekonstruksi di negara-negara Eropa yang dilanda perang. Selanjutnya, AS juga memberikan bantuan program pangan pada masa PD II kepada sekutu Eropa. Pada akhir perang, AS tetap membantu negara-negara Eropa dalam upaya rekonstruksi di bawah Program *Marshall Plan* (1948 – 1952). AS juga memberikan bantuan pangan pada Perang Korea (1950–53), sehingga *Marshall Plan* dan Perang Korea dinilai sebagai titik balik utama dalam kebijakan bantuan pangan AS. Aktifnya bantuan program pangan yang diberikan oleh AS pada rentang waktu PD II tersebut kemudian juga menginisiasi dibentuknya bantuan pangan multilateral pada tahun 1943. Di mana, Presiden AS Franklin D. Roosevelt menyelenggarakan Konferensi PBB terkait Pangan dan Pertanian yang menjadi dasar dibentuknya *Food and Agriculture Organization* (FAO) di tahun 1945 (Shaw, 2011).

Setelah berdirinya FAO pada tahun 1945, organisasi ini memiliki ambisi untuk membentuk kebijakan keamanan pangan multilateral. Ambisi ini kemudian mendapat dukungan dari AS, dengan ini, AS mengajukan proposal program bantuan pangan multilateral. Program ini pada awalnya hanya eksperimental dan akan dievaluasi kelanjutannya setelah tiga tahun dengan anggaran yang dibatasi, serta mendapat bantuan pendanaan dari AS berupa hasil surplus pertanian nasionalnya (Shaw, 2011). Program bantuan pangan mulai dilakukan di bawah FAO dengan menerapkan beberapa program percobaan. Pembentukan program percobaan ini sebagai bantuan pangan multilateral yang masih bersifat terbatas menunjukkan kemampuan PBB di mana sebagai OI, PBB mampu menjalankan program bantuan kemanusiaan dengan biaya yang tidak besar dan tidak menimbulkan ancaman terhadap program bantuan pangan bilateral atau perdagangan komersial.

Pada tahun 1961, proposal program bantuan pangan multilateral akhirnya disetujui dan WFP secara resmi dibentuk. WFP PBB / FAO didirikan dalam resolusi yang disahkan melalui Konferensi FAO dan Sidang Umum PBB masing-masing pada tanggal 24 November dan 19 Desember 1961. Lahirnya WFP sebagian besar dipengaruhi oleh visi dan kepemimpinan awal FAO, dukungan dari pihak PBB serta bantuan dari AS yang juga sangat besar untuk pendanaan program percobaan dalam tiga tahun pertama. Pada akhir periode percobaan WFP di tahun 1965, 101 negara telah berpartisipasi dalam program sebagai donor, penerima, atau keduanya. Program percobaan ini kemudian dinilai berhasil, sehingga mengarah pada kelanjutan berdirinya WFP setelah 1965, dengan pusat administrasi di Roma, Itali. Berdirinya WFP mendapat banyak dukungan dari donor, baik negara berkembang maupun maju, kerjasama pejabat di negara penerima, serta dua organisasi yang mengawali dibentuknya WFP yaitu PBB dan FAO (Shaw, 2011).

Hingga saat ini, WFP terus melakukan tugasnya untuk mencapai SDGs nomor dua yaitu *Zero Hunger*, di mana PBB melalui WFP berusaha untuk mencapai tujuan mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan meningkatkan nutrisi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan di seluruh dunia. WFP membantu korban bencana alam dan bencana akibat ulah manusia (*man-made*) dengan mendistribusikan makanan ke daerah krisis di suatu negara. Program WFP tidak terbatas pada distribusi langsung makanan (*food aid*), melainkan telah berkembang, di antaranya membantu masyarakat korban perang dan konflik yang membahayakan jiwa lainnya, korban wabah penyakit seperti epidemi dan pandemi, hingga masyarakat yang kelaparan akibat situasi alam seperti gagal panen, banjir, kekeringan, gempa bumi, dan badai. Selain mendistribusikan bantuan pangan dalam keadaan darurat, WFP juga memberikan bantuan pangan yang bersifat jangka panjang.

Di antara negara-negara berkembang yang menerima bantuan dari WFP, Sudan Selatan merupakan salah satu di antaranya. Sudan Selatan adalah negara

yang masih sangat muda, di mana negara ini melepaskan diri dari Republik Sudan (Utara) di tahun 2011, dengan kondisi keamanan nasional yang belum stabil. Konflik yang terjadi antara Sudan dan Sudan Selatan telah berlangsung selama 56 tahun hingga akhirnya negara ini berhasil melepaskan diri di tahun 2011. Konflik panjang ini terjadi akibat pengecualian pembangunan di daerah selatan, hingga dilarangnya masyarakat dari selatan untuk menduduki jabatan publik. Perbatasan Sudan diperintah secara tribalisme baik dari segi administrasi hingga militer, sehingga khususnya orang-orang di pinggiran selatan, dianggap sebagai warga negara kelas dua dan terus mendapat komoditas paling buruk (Johnson, 2016). Setelah berhasil mencapai kemenderkaannya sendiri, Sudan Selatan memperoleh 98 persen pendapatan negara dari sektor minyak, namun hanya ada sedikit infrastruktur di luar dari sumur minyak dan jaringan pipa, bahkan, bagi penduduk yang tinggal di zona minyak, salah satu dampak yang mereka rasakan adalah air minum kotor yang tercakup dalam buih, yang menurut pengujian terbukti penuh dengan kimia beracun (Martell, 2018).

Kerawanan pangan merupakan ancaman utama yang dihadapi oleh masyarakat Sudan Selatan, hal ini kemudian menjadi kekhawatiran bagi WFP, organisasi internasional ini memberikan *food assistance* atau bantuan berupa makanan kepada masyarakat Sudan Selatan. Sejak tahun 2011, di mana Sudan Selatan telah melepaskan diri dari Sudan, WFP telah hadir sebagai pemberi bantuan kemanusiaan khususnya bantuan pangan kepada negara ini. WFP telah memberikan bantuan di hampir seluruh wilayah negara yang dapat diakses sejak merdekanya Sudan Selatan di tahun 2011 (dan sebagai bagian dari Sudan sejak 1963) (World Food Programme, 2020). Dengan tujuan untuk mengubah bantuan pangan menjadi alat untuk membangun perdamaian dan pembangunan di masa depan, WFP melibatkan mitra termasuk PBB dan badan internasional lainnya, pemerintah setempat, organisasi masyarakat sipil akar rumput dan memberdayakan masyarakat dengan fokus khusus untuk mendorong peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan.

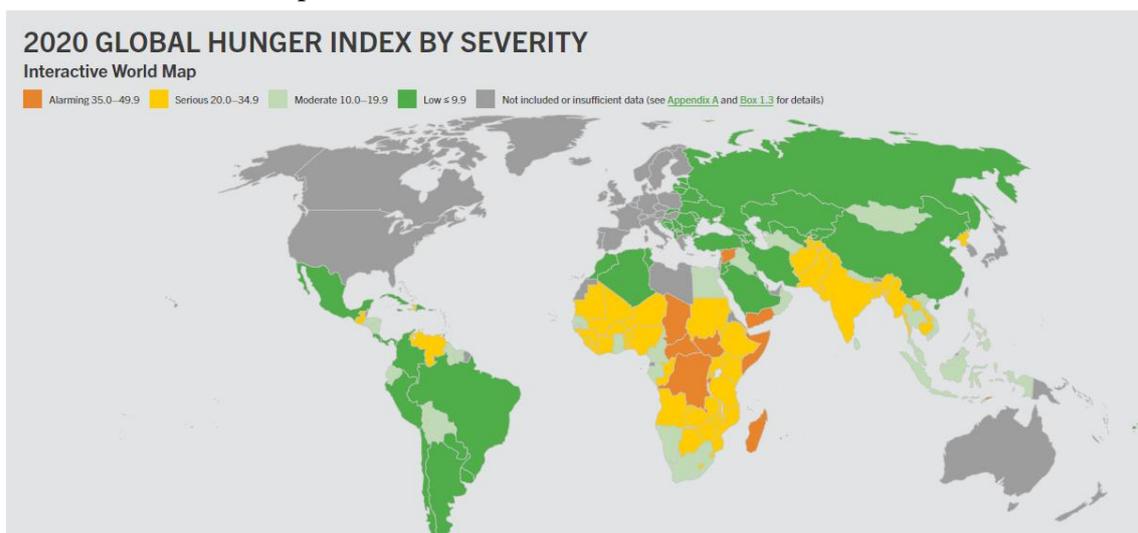
Pada tahun 2016, 3,6 juta orang di Sudan Selatan masih membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat kelaparan (World Food Programme, 2016). Di tahun

ini, WFP mengusung sebuah inovasi program bantuan berupa *Food Assistance for Assets* (FFA), program ini kemudian menjadi salah satu kendaraan utama WFP dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi, yang mana pada saat yang sama juga meningkatkan kapasitas serap dan adaptif masyarakat, melalui penciptaan aset yang pada akhirnya memperkuat ketahanan mereka. FFA merupakan salah satu program dalam *Country Strategic Plans* (CSP) oleh WFP, dengan mengadopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya SDG 2 (*Zero Hunger*), dan SDG 17 (*Partnership for The Goals*) (World Food Program, 2019). Tanggung jawab dalam memberantas kelaparan dan malnutrisi ada pada pemerintah nasional, sehingga WFP hadir untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam memenuhi tujuan ini. WFP secara sistematis menempatkan pemangku kepentingan nasional sebagai pendorong dan secara strategis membantu negara tersebut mencapai *Zero Hunger*. Pendekatan yang terintegrasi dengan pemerintah nasional ini dilaksanakan melalui *Country Strategic Plans* (CSP). CSP yang dirancang untuk jangka waktu hingga 5 tahun ini memungkinkan WFP untuk mengatasi program yang terfragmentasi, kesenjangan koordinasi internal dan biaya transaksi yang tinggi. WFP juga menyelaraskan kerjasama dengan institusi internasional lainnya seperti induk organisasi ini yaitu FAO dan International Fund for Agricultural Development (IFAD), *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) serta donator negara dan mitra lainnya (World Food Programme, 2017).

Kondisi ketahanan pangan yang menunjukkan terjadinya kerawanan pangan dan krisis lingkungan di tanah Sudan Selatan kemudian juga diperkeruh dengan pecahnya perang saudara yang terjadi sejak Desember 2013. Pada tahun 2014, World Bank melaporkan bahwa sebagian besar penduduk mengalami *food insecurity* (2 dari 3 orang) serta hidup dalam kemiskinan (1 dari 2 orang) dan saat ini, Sudan Selatan berada di peringkat 181 dari 188 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia dengan harapan hidup hanya 56 tahun (Pape & Parisotto, 2018). Menurut *2020 Global Hunger Index*, Sudan Selatan juga berada pada level *alarming* dengan kisaran prevalensi nilai kurang gizi sementara di atas 35 – 50 % (Gambar 2) (GLOBAL HUNGER INDEX, 2020). Catatan ini menunjukkan

dampak atas konflik militer yang sedang berlangsung terhadap mata pencaharian masyarakat Sudan Selatan akibat perubahan harga pangan, perkiraan kerugian kehilangan dan gagal panen. Perang saudara ini menyebabkan kerusakan, kematian, dan meningkatnya angka pengungsi. Perang yang terjadi di saat Negara mengalami krisis ekonomi, hiperinflasi dan meningkatnya angka pengungsi ini menyebabkan rendahnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam bertahan hidup serta meningkatnya angka perempuan dan anak yang kehilangan kepala keluarga akibat perang tanpa bantuan material. Perekonomian yang runtuh, produksi tanaman yang berkurang, dan ketergantungan pada impor secara serius menghilangkan kemampuan masyarakat Sudan Selatan untuk mendapatkan makanan bergizi yang cukup, sehingga dapat membahayakan jutaan nyawa (World Food Programme, 2020).

Gambar 2. Indeks kelaparan dunia



(Sumber: Global Hunger Index 2020, <https://www.globalhungerindex.org/ranking.html>)

Meski krisis ini terjadi secara *man-made* di antaranya akibat perang saudara, inflasi, gagal panen, ketidakseimbangan populasi dan kebijakan pemerintah, krisis pangan di Negara ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, di mana, menurut Indeks Kerentanan Perubahan Iklim 2017, Sudan Selatan berada di peringkat lima dengan kinerja terburuk di dunia bersama Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, Haiti dan Liberia. Proyeksi menunjukkan bahwa

di Sudan Selatan, pemanasan global akan dirasakan dua setengah kali lebih besar dari rata-rata global. Hal ini sangat berpengaruh bagi Negara ini, pasalnya 95% orang di Sudan Selatan, atau lebih dari 11 juta orang, bergantung pada sektor yang sensitif terhadap iklim, termasuk pertanian, sumber daya kehutanan dan perikanan sebagai mata pencaharian masyarakat (Stalon & Choudhary, 2017). Cuaca yang lebih kering juga cenderung menjadi pendorong yang mendasari peningkatan deforestasi dan konflik berbasis sumber daya. Melihat kondisi lingkungan negara ini yang semakin memburuk akibat terjadinya perubahan iklim, melalui program FFA, tidak hanya memberikan bantuan terkait ketahanan pangan, *climate action* juga menjadi salah satu hal yang tidak luput dari perhatian WFP.

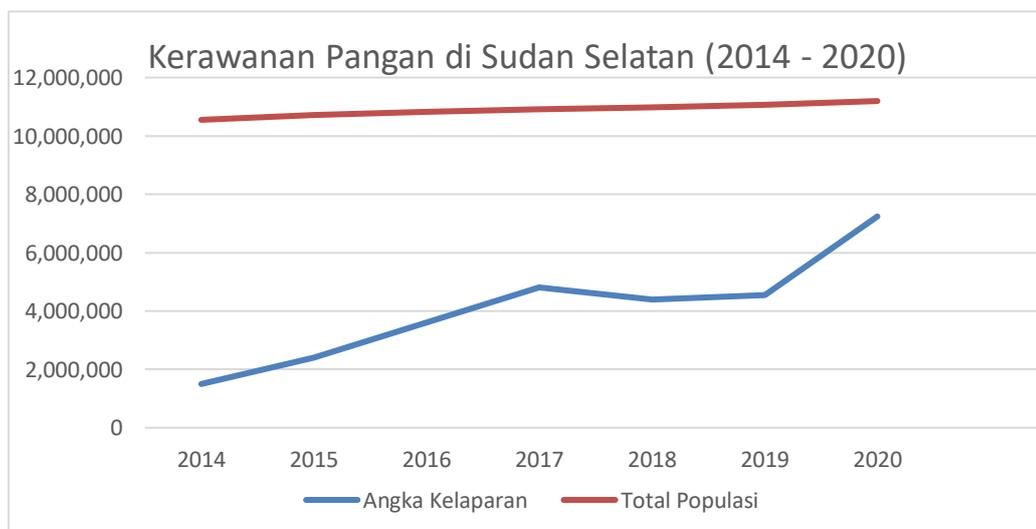
Climate resilience atau ketahanan iklim sangat diperlukan oleh suatu negara untuk menghadapi tantangan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi produksi pangan nasional, tak terkecuali bagi Sudan Selatan. Variabilitas dan perubahan iklim mengancam ketahanan pangan secara langsung, misalnya, dapat mengurangi hasil panen dan secara tidak langsung, dapat mengganggu sistem dan infrastruktur yang digunakan masyarakat untuk mengakses pangan. Melalui ketahanan iklim, diharapkan suatu kelompok masyarakat mampu menyerap guncangan dan tekanan iklim tanpa mengalami situasi darurat secara jangka panjang, terutama bagi masyarakat miskin. Ketahanan iklim sangat diperlukan mengingat populasi terus bertambah serta tekanan pada pasokan air dan produksi pangan yang tidak dapat diprediksi (IISD, 2013).

Sistem pangan lokal memang menjadi penentu utama harga dan akses pangan yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional, namun dengan adanya interdependensi terkait dengan pasar global, dampak iklim di suatu daerah penghasil pangan utama dunia juga akan berdampak pada harga dan akses pangan bagi negara lain. Ketersediaan dan harga pangan yang tidak dapat dipenuhi karena rendahnya ketahanan iklim juga dapat menyebabkan kerusuhan sosial seperti yang terjadi di Afrika, hal ini menunjukkan bagaimana harga pangan lokal terkait erat dengan kekeringan sebagai penyebab langsung, dan kerusuhan sosial sebagai konsekuensi langsungnya, seperti analisis yang dikutip dari artikel jurnal berjudul *Food Price Spikes and Social Unrest in Africa* oleh Smith bahwa:

“A key conclusion is that stable and resilient food markets are key to avoiding social disruption.” (Smith, 2013)

Pentingnya ketahanan iklim bagi ketersediaan pasokan pangan kemudian diimplementasikan WFP melalui program FFA yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016 di Sudan Selatan. WFP mengharapkan terwujudnya kegiatan di Sudan Selatan yang berdasar pada empat pilar utama, yaitu pemulihan kapasitas produktif tanah subur, pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam serta adaptasi iklim hingga pengembangan keterampilan. Program ini menyasar masyarakat khususnya rumah tangga untuk bersama-sama mengidentifikasi prioritas mereka dalam kegiatan penciptaan asset (World Food Programme, 2017). WFP melalui program FFA secara khusus mengharapkan terwujudnya SDG nomor 2, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, serta mendukung terciptanya ketahanan iklim, melalui sektor pertanian yang berkelanjutan, mengingat kondisi ketahanan pangan negara yang buruk akibat gagalnya pemenuhan pangan bagi sebagian besar masyarakat Sudan Selatan, maka program ini bertujuan memberikan bantuan berupa asset yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam mewujudkan pembangunan internasional (World Food Programme, 2017).

Grafik 1. Kerawanan pangan di Sudan Selatan. Data dari WFP Situation Report per Desember 2014 – 2020.



Grafik di atas (Grafik 1) merupakan data yang diperoleh dari *Situation Report* WFP yang diterbitkan setiap tahun pada bulan Desember terkait tingkat kerawanan pangan di Sudan Selatan mulai dari tahun 2014, tepatnya pasca terjadinya perang saudara pada Desember 2013, hingga per-Desember 2020. Berdasarkan data di atas, pada 2014, tercatat sebanyak 1,5 Juta jiwa mengalami kerawanan pangan, selanjutnya pada tahun 2015 meningkat dengan total terdata 2,4 Juta jiwa, pada tahun 2016 meningkat dengan total 3,6 Juta jiwa (World Food Programme, 2016), pada tahun 2017 meningkat dengan total 4,8 Juta jiwa (WFP, 2017), selanjutnya sempat menurun sebanyak 400.000 jiwa di tahun 2018 sehingga tercatat total 4,4 Juta jiwa (WFP, 2018), namun kembali mengalami kenaikan di tahun 2019 dengan total 4,54 Juta jiwa (WFP, 2019) dan meningkat secara tajam di tahun 2020 hingga tercatat 6,48 Juta jiwa masih mengalami kerawanan pangan di Sudan Selatan (WFP, 2020). Sementara itu, untuk total populasi Sudan Selatan, dapat dilihat bahwa negara ini tidak mengalami pertumbuhan penduduk secara besar diikuti angka mortalitas sebesar 62,4 dari setiap kelahiran 1,000 bayi sejak tahun 2014 – 2019 (World Bank, 2019). Program FFA sendiri mulai diimplementasikan di sebagian besar wilayah pada tahun 2016 dan berjalan selama empat tahun untuk satu periodenya, sehingga dapat dilihat perkembangan dari program ini hingga tahun 2020.

Berdasarkan data-data di atas, dapat dilihat bahwa Sudan Selatan masih berjuang melawan kerawanan pangan nasional, hal ini menjadi perhatian berbagai organisasi internasional yang bergerak di bidang bantuan kemanusiaan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kelaparan di Sudan Selatan. Namun, bantuan kemanusiaan yang diberikan ini tentunya harus mengacu pada izin pemerintah setempat, hal ini kemudian menjadi kendala bagi organisasi internasional yang ingin masuk dan memberikan bantuan, pasalnya perang masih terus terjadi di beberapa wilayah dan pihak pemerintah membatasi akses masuk bagi pekerja dari organisasi internasional yang hendak melakukan mobilisasi untuk distribusi pangan. Selanjutnya, seperti yang dilansir dari Inter Press Service News, pemerintah Sudan Selatan salah satunya memberikan tarif bagi organisasi

internasional yang akan masuk dan memberikan bantuan pangan sebagai hambatan yang dibuat pemerintah untuk mencegah pekerja kemanusiaan melakukan pekerjaan penting mereka di zona konflik. Pejabat pemerintah juga terlibat dalam perekrutan staf organisasi internasional dengan meninjau daftar kandidat hingga melakukan wawancara serta pilihan veto. Pemerintah juga kerap kali mengubah izin dan persyaratan pendaftaran, sehingga menyulitkan staf organisasi internasional dalam melakukan mobilisasi dengan tujuan bekerja (Monaghan, 2018).

Kelaparan menjadi salah satu hal yang dipolitisasi dan bantuan makanan menjadi sebuah strategi untuk melawan satu sama lain antara pihak pemerintah dengan oposisi. Pihak pemerintah Sudan Selatan juga menolak untuk mengakui skala krisis yang terjadi di negaranya, sehingga pemerintah berbeda pendapat dengan organisasi yang menganalisis tingkat kerawanan pangan di Sudan Selatan, seperti contohnya, menurut ahli ketahanan pangan internasional diperkirakan lebih dari 30.000 orang di Sudan Selatan kemungkinan besar akan mengalami kelaparan, sementara puluhan ribu lainnya di ambang kelaparan. Namun, pemerintah akan menolak pernyataan tersebut dan mengakui bahwa hanya 11.000 yang menghadapi kelaparan, hampir 10 kali lebih sedikit dari analisis ahli ketahanan pangan (Mednick, 2021).

Kendala dalam pemberian bantuan pangan oleh WFP kepada Sudan Selatan yaitu akibat pemerintah yang pasif, yang justru memanfaatkan bantuan tersebut membuat perkembangan terhadap upaya pencegahan kerawanan pangan menjadi pasif, bahkan menurun. Sudan Selatan yang telah menerima bantuan dari WFP melalui program FFA sejak tahun 2016 ini belum dapat menguatkan sektor ketahanan pangan nasional, di mana hingga Januari 2020, 6,48 juta orang di Sudan Selatan dilaporkan masih membutuhkan bantuan kemanusiaan pangan. Kerawanan pangan tersebut kemudian juga memberikan implikasi pada perempuan dan anak seperti tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan dan pernikahan dini, hingga rendahnya angka pendidikan dengan 80% perempuan di Sudan Selatan yang masih berada pada kondisi buta huruf,

sehingga bantuan pangan dinilai sangat penting untuk menghindari bencana kemanusiaan di negara tersebut (World Food Programme, 2020). Pertumbuhan angka kelaparan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk di Sudan Selatan, di mana berdasarkan data World Bank, pada tahun 2016 total populasi di Sudan Selatan yaitu sebanyak 10,832,512 jiwa, sementara di tahun 2019 sebanyak 11,062,113 jiwa (World Bank, 2019). Data tersebut populasi meningkat kurang dari satu juta jiwa, namun angka kelaparan meningkat sebanyak hampir tiga juta jiwa.

Hal tersebut kemudian menarik perhatian sekaligus kekhawatiran penulis terhadap situasi keamanan manusia di Sudan Selatan, bahwa setelah dibentuknya organisasi internasional seperti PBB yang memiliki ambisi untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional hingga badan lainnya yang dibentuk dengan kekhususan menangani isu pangan internasional yaitu WFP, belum dapat mencegah situasi yang sangat memprihatinkan yang dialami masyarakat di Sudan Selatan. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang kian pesat, di mana kontribusi positif lintas negara dapat diberikan dengan lebih mudah, belum dapat dirasakan oleh masyarakat Sudan Selatan yang masih berada dalam keterpurukan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan oleh hampir sebagian besar masyarakatnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan berfokus pada peran WFP dalam menangani kerawanan pangan dan meningkatkan ketahanan iklim melalui program FFA pasca terjadinya konflik di Sudan Selatan. Penelitian ini akan dimulai dari tahun 2016 di mana WFP mulai menjalankan program FFA secara intens di beberapa wilayah Sudan Selatan seperti Bahr el Ghazal Utara, Warrap, Lakes dan Equatoria Barat, dan beberapa wilayah di Jonglei, Unity, Bahr el Ghazal Barat, dan Equatoria Timur hingga tahun 2020, di mana negara ini masih berada dalam status darurat kelaparan (World Food Programme, 2020).

1.2 Perumusan Masalah

Sudan Selatan merupakan salah satu Negara di dunia yang menderita kerawanan pangan yang secara bersamaan diikuti oleh kondisi cuaca buruk yang mempengaruhi hasil produksi pangan nasional. WFP sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan telah memberikan bantuan makanan sejak Sudan Selatan melepaskan diri dari Sudan di tahun 2011 dan secara intens memberikan bantuan melalui program FFA di sebagian besar wilayah sejak 2016. Meski bantuan telah diberikan oleh WFP bersama organisasi internasional lainnya sebagai mitra pembangunan internasional, hingga awal 2020, Sudan Selatan masih berada dalam tingkat darurat kelaparan dengan 6,48 juta orang masih membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat kelaparan. Statistik ini menunjukkan tetap melemahnya sektor ketahanan pangan nasional, dibandingkan sejak tahun 2016 ketika program FFA mulai diimplementasikan di sebagian besar wilayah Sudan Selatan yaitu sebanyak 3,6 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan pangan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai **bagaimana peran WFP melalui *Food Assistance for Assets* (FFA) dalam memberikan bantuan pangan dan peningkatan ketahanan iklim di Sudan Selatan periode 2016 – 2020?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran organisasi internasional sebagai aktor dalam hubungan internasional yang memiliki fungsi untuk memberikan bantuan kemanusiaan dalam studi kasus peran *World Food Programme* (WFP) dalam menangani kerawanan pangan melalui peningkatan ketahanan iklim di Sudan Selatan dalam program *Food Assistance for Assets* (FFA) periode tahun 2016 hingga 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Secara akademis, penulis harap penelitian ini dapat memberikan pemahaman atas analisis peran organisasi internasional yaitu WFP terhadap aktor negara yaitu Sudan Selatan melalui bantuan yang diberikan melalui program FFA dalam rangka mewujudkan pembangunan internasional. Penelitian ini akan mempertegas kelemahan serta kelebihan organisasi internasional dilihat dari daya perannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan terbagi ke dalam lima bab, di mana pada setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab dengan pembahasan yang disesuaikan. Maka sistematika penulisan yang penulis rencanakan yaitu sebagai berikut

BAB I: Pendahuluan

Dalam Bab 1, penulis akan memaparkan dasar permasalahan penelitian yang terbagi ke dalam masing-masing sub bab di antaranya Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam Bab 2, penulis akan melakukan tinjauan pustaka sebagai bahan pendukung referensi penelitian dengan membaginya ke dalam sub bab Literature Review, Kerangka Pemikiran, Alur Pemikiran dan Asumsi.

BAB III: Metode Penelitian

Dalam Bab 3, penulis akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang tertuang dalam masing-masing sub bab yaitu

Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Analisis Data, dan Waktu dan Tempat Penelitian.

BAB IV: Sejarah Keterlibatan WFP di Sudan Selatan

Dalam Bab 4, penulis akan mengelaborasi fenomena kerawanan pangan yang terjadi di Sudan Selatan beserta latar belakang dan sejarah keterlibatan WFP dalam memberikan bantuan pangan melalui kerjasama dengan pemerintah setempat dalam beberapa tahun ke belakang.

BAB V: Upaya WFP melalui *Food Assistance for Assets* dalam Menangani Kerawanan Pangan di Sudan Selatan periode 2016 – 2020

Dalam Bab 5, penulis akan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh WFP melalui program *Food Assistance for Assets* (FFA) dalam memberikan bantuan pangan dan meningkatkan ketahanan iklim dalam rangka menangani kerawanan pangan di Sudan Selatan periode 2016 sampai dengan 2020.

BAB VI: Penutup

Dalam Bab 6 yaitu sebagai bab terakhir atau penutup dalam penelitian ini, penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan yang telah dianalisis pada Bab 4 dan Bab 5 dan menyertakan saran terkait kasus yang telah dianalisis, maka penulis akan membaginya menjadi sub bab Kesimpulan dan Saran dalam bab penutup ini.